

INOVASI E-GOVERNMENT APLIKASI BERBASIS PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU CARIK JAKARTA DALAM PENGUMPULAN DATA KOMPREHENSIF KELUARGA OLEH DASAWISMA

Talitha Firda Arsy¹, Lukmanul Hakim², Dadan Kurniansyah³

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}*

E-mail: talitharsy124@gmail.com

ABSTRAK

Pendataan keluarga merupakan data penting yang belum dikelola secara optimal dan masih terpecah, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan data yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi keluarga, maka dibuatlah inovasi e-government yaitu aplikasi Carik Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pada aplikasi Carik Jakarta dengan menggunakan kerangka Teori Atribut Inovasi dari Rogers. Metode yang digunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian membuktikan keberhasilan inovasi Carik Jakarta ditentukan dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas data, serta kesesuaiannya dengan mekanisme pendataan sebelumnya yang didigitalisasi dan diintegrasikan. Hambatan utama inovasi terletak pada keterbatasan literasi digital sebagian kader Dasawisma, kendala teknis aplikasi, dan rendahnya tingkat keterlihatan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses uji coba dan piloting yang dilakukan secara bertahap berperan penting dalam mendukung adopsi inovasi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi kajian inovasi e-government berkaitan pada perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, stabilitas sistem, dan strategi sosialisasi kebijakan berbasis data keluarga.

Kata Kunci: *Inovasi, E-Government, Carik Jakarta, Pendataan Keluarga Satu Pintu*

ABSTRACT

Family data, which is important but has not been optimally managed and remains scattered, is needed by the DKI Jakarta Provincial Government for comprehensive and accurate insights into family conditions; therefore, an e-government innovation called the Carik Jakarta application was created. This study aims to analyze the innovation in the Carik Jakarta application using Rogers' Innovation Attribute Theory framework. The method used is qualitative with data collection techniques of observation, interviews, documentation studies, and literature studies. The results of the study show that the success of the Carik Jakarta innovation is determined by improving the efficiency, accuracy, transparency, and accountability of data, as well as its compatibility with the previous data collection mechanisms.

that have been digitized and integrated. The main obstacles to innovation lie in the limited digital literacy of some Dasawisma cadres, technical constraints of the application, and the low level of visibility of direct benefits to the community. The gradual trial and piloting process played an important role in supporting the adoption of innovation. This study provides empirical and practical contributions to e-government innovation studies related to the need to strengthen human resource capacity, system stability, and data-based family policy socialization strategies.

Keywords: *Innovation, E-Government, Carik Jakarta, One-Stop Family Data Collectio*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 menjadi landasan legal bagi otoritas daerah dalam mengelola statistik kependudukan, mulai dari tahap pengumpulan hingga penyajian informasi keluarga kepada publik. Dalam praktiknya, upaya integrasi data ini direalisasikan melalui mekanisme Pendataan Keluarga yang sistematis. (Carik Jakarta, 2021:1)

Saat ini, data merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adanya data dapat dijadikan sebagai acuan atau parameter yang akurat untuk membuat sebuah perencanaan. Data sangat penting saat ini karena data berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan sosial. Semakin baik pengumpulan data yang dikumpulkan, maka semakin berguna informasi tersebut untuk membuat perencanaan pembangunan saat ini dan di masa depan yang akan datang. Maka pengumpulan data akan sangat penting bagi pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam meningkatkan sinkronisasi data dan integrasi pencatatan kependudukan serta nantinya akan

digunakan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan publik, membuat keputusan, dan mengimplementasikan inisiatif pelaksanaan program sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Lampiran “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa manajemen serta pengawasan terhadap Sistem Informasi Keluarga merupakan bagian integral dari sub-urusan Keluarga Berencana.” Secara teknis, mekanisme ini dipertegas dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 yang mengatur tata cara penghimpunan, pemrosesan, hingga pendayagunaan data kependudukan dan kesejahteraan keluarga.” Regulasi tersebut menggaris bawahi pentingnya sinergi antara otoritas pemerintah dan partisipasi publik dalam siklus pembaruan data setiap lima tahun untuk menjamin informasi yang akurat serta akuntabel. (Carik Jakarta, 2022:1).

Masalah lainnya yaitu juga dari bagaimana pengumpulan data itu dilakukan. Proses pengumpulan data

menjadi rumit dengan mengumpulkan data secara manual. Karena semakin berkembangnya zaman, diikuti dengan cepatnya kemajuan teknologi yang ada mengakibatkan pendataan dengan cara yang konvensional dianggap kurang efektif dan efisien juga menyita banyak waktu. Selain itu juga rawan akan penyalahgunaan dan kesalahan penulisan.

Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan dan perumusan kebijakan secara lebih efektif, otoritas pemerintah terus melakukan berbagai langkah perbaikan kinerja. Upaya ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur data pusat serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) yang menjadi pilar utama dalam transformasi digital sektor publik dan birokrasi. Agar target *good governance* dapat terealisasi, para aparatur negara harus jeli dalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan modernisasi layanan. Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan adalah pengembangan inovasi pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

Dalam penjelasan yang dikutip dari (Kurniansyah & Hannie, 2020) menyatakan bahwa gagasan dari *Electronic Government* saat ini berevolusi menjadi tren dan kebutuhan dalam mengubah struktur administrasi dan layanan oleh pemerintah, dimulai dari penggunaan teknologi informasi yang pelaksanaannya meluas sampai ke

Pemerintahan Desa. Akibatnya, penelitian tentang *e-Government* menggunakan berbagai metodologi keilmuan, termasuk manajemen, tata kelola pemerintahan, politik, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu penulis buku yang terkenal tentang inovasi, Rogers (2003) dalam (Suwarno, 2008) mendefinisikan inovasi sebagai sebuah konsep, aktivitas, atau hal yang dianggap baru oleh orang-orang dari unit adopsi yang berbeda. Sedangkan Damanpour (1991) dalam (Suwarno, 2008) mengklarifikasi bahwa sebuah inovasi dapat berupa barang atau jasa baru, kemajuan teknologi dalam metode produksi, atau kerangka kerja organisasi dan administrasi yang baru, kerangka kerja administratif dan struktural yang baru, atau inisiatif baru bagi para anggota organisasi, atau strategi baru bagi para peserta kelompok.

Inovasi dalam teknologi merupakan faktor penting untuk mencapai sebuah tujuan di era digital saat ini. Teknologi informasi, khususnya aplikasi di *Smartphone* yang telah memberikan cara baru bagi pemerintah untuk memaksimalkan beberapa elemen tanggung jawabnya. Seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa

gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Sebagai Ibukota Negara yang juga sebagai pusat perekonomian Negara Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah yang mendorong laju urbanisasi yang tinggi pada perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Orang-orang yang pindah tersebut dikarenakan mereka berharap untuk menaikkan taraf hidup mereka dengan bekerja di kota dengan keuntungan yang lebih tinggi, selain itu juga lebih banyak fasilitas yang tersedia di kota daripada di desa (Yuangwidi et al., 2021). Karena itu, banyak orang yang tinggal di luar DKI Jakarta memutuskan untuk pindah dari daerahnya ke Jakarta, sehingga jumlah kependudukan warga di Jakarta semakin bertambah.

Mengenai perpindahan penduduk atau migrasi ini akhirnya menimbulkan masalah kompleks pertumbuhan penduduk dan dalam mengumpulkan data-data penduduk, khususnya pengumpulan data keluarga. Masalah yang dimaksud adalah bagaimana keadaan dari masalah sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat disebuah wilayah memerlukan pemetaan yang tepat dan komprehensif untuk mendapatkan penindakan yang tepat dan efisien. Instrumen yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tersebut adalah dengan menggunakan data. (Muamar, 2023)

Awal adanya inovasi pendataan keluarga satu pintu oleh Bapak Rizky Hamid, Kepala UPT Pusdatin Keluarga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta yang mengatakan bahwa inovasi dalam pendataan keluarga ini ada karena kebutuhan data yang dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta akan potret atau gambaran keadaan keluarga-keluarga secara riil di DKI Jakarta itu seperti apa, Data keluarga di DKI Jakarta tersebar di berbagai tempat dan belum terintegrasi ke dalam satu sistem. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi keluarga-keluarga di Jakarta yang mana ketika mendapatkan potret secara utuh atau lengkap akan memudahkan kebutuhan-kebutuhan terkait program yang ingin dibuat atau disesuaikan oleh Pemprov DKI Jakarta jadi lebih tepat sasaran, lebih menjangkau seluruh populasi yang hidup dan tinggal di Jakarta.

Diawali dari kebutuhan tersebut, juga melihat bahwa data keluarga yang dikumpulkan oleh kader-kader dasawisma merupakan data-data penting yang belum dikelola dengan baik dan belum digunakan secara maksimal karena pengumpulannya menggunakan cara manual. Data yang dikumpulkan dengan cara manual memiliki potensi rentan ketidakakuratan, kesalahan pencatatan, ketidaklengkapan data dan kesulitan dalam pemanfaatan data.

Sebagai respons atas berbagai kendala tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kerangka regulasi melalui “Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 mengenai penyelarasan layanan kesejahteraan keluarga.” Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya “Instruksi Gubernur Nomor 100 Tahun 2019, yang secara spesifik memandatkan pelaksanaan pendataan keluarga secara terintegrasi dengan memanfaatkan platform digital Carik Jakarta.”

Carik Jakarta berfungsi sebagai pusat penyatuan layanan kesejahteraan keluarga yang berbasis pada pengumpulan data terpadu oleh personel Dasawisma di wilayah DKI Jakarta. Platform digital ini dikembangkan untuk menghimpun basis data keluarga secara komprehensif, mulai dari parameter kependudukan dan kesehatan hingga kondisi ekonomi serta lingkungan fisik bangunan. Dengan data-data yang dikumpulkan tersebut, maka dapat terlihat gambaran kesejahteraan setiap keluarga di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kata “Carik” diambil dari sebutan Jawa yang artinya ‘juru tulis’. Hal ini menggambarkan tugas kader PKK atau dasawisma sebagai pendata yang menjadi ujung tombak kolaborasi pengumpulan data terpusat ini. (P. A. D. P. P. Dinas Pemberdayaan, 2022)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) berkolaborasi

dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan inovasi Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui aplikasi Carik Jakarta. Implementasi tata kelola data keluarga di Jakarta secara resmi mengadopsi platform digital melalui serangkaian kebijakan gubernur yang dimulai sejak akhir tahun 2019. Melalui sinergi Dinas PPAPP dan TP PKK, Instruksi Gubernur No. 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa setiap inisiatif kesejahteraan masyarakat harus bersandar pada data tunggal berbasis Dasawisma. Transformasi menuju ekosistem Carik Jakarta ini kemudian diperkuat oleh landasan hukum yang lebih spesifik, yakni Ingub No. 100/2019 serta No. 25/2020. Guna menjamin validitas data secara berkelanjutan, Instruksi Gubernur No. 15 Tahun 2021 pun diterbitkan untuk memandu jalannya pendataan pada periode berikutnya.

Setiap kader Dasawisma dapat mengunduh dan menginstal program ini di telepon genggam mereka. Sampai saat ini, jumlah yang sudah mengunduh aplikasi Carik Jakarta di *PlayStore* sudah lebih dari 100.000+ unduhan. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh kader Dasawisma selama proses pendataan berlangsung. Setiap kader Dasawisma memiliki ID Kader yang berbeda dan *password* atau kata kunci yang hanya dapat diakses oleh kader tersebut.

Gambar 1. 1 Tampilan Awal Aplikasi Carik Jakarta



Sumber: *Playstore* Aplikasi Carik Jakarta, 2025.

Pendataan Keluarga Satu Pintu terhenti sementara pada bulan Maret 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Terlebih pada saat pandemi *Covid-19* itulah yang terjadi menjadi tantangan dan hambatan dalam mobilitas sehari-hari yang menyebabkan teknologi informasi menjadi sangat vital salah satunya dalam mengadakan pelayanan publik. Selama pandemi berlangsung, Aplikasi Carik Jakarta terus disempurnakan dengan menambahkan menu informasi mengenai orang-orang dengan komorbiditas dan anak-anak yang membutuhkan perawatan khusus karena salah satu atau kedua orangtuanya terpapar *Covid-19*. Saat pendataan dihentikan karena pandemi *Covid-19*, Pendataan Keluarga Satu Pintu dihentikan dengan cakupan pendataan sebesar 70% data individu berdasarkan target *de jure* Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Hasil sementara Pendataan Keluarga Satu Pintu per 20 Maret 2020 berdasarkan data bersih/clean yaitu data individu sebanyak 7.401.520, data keluarga

sebanyak 2.271.148, dan data bangunan sebanyak 1.832.134. Hingga hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu di tahun 2022 berhasil terkumpul sebanyak 7.943.396. (Pusat Data dan Informasi Keluarga (PUSDATIN Keluarga), 2023)

Kemudian PKSP diadakan lagi pada bulan Oktober 2021. Sekitar 76.114 kader dasawisma turut serta dalam proses pendataan tersebut. Pengisian data dapat dilakukan oleh warga sendiri melalui aplikasi Carik Jakarta Mandiri yang dimonitori oleh kader dasawisma dengan menggunakan aplikasi Carik Jakarta. Mekanisme pendataan mandiri tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan adaptif khusus dilakukan hanya selama pandemi untuk mengurangi kontak langsung antara kader dan warga. PKSP dihentikan sementara pada Februari 2022, dengan jumlah data yang telah divalidasi dan terbaru saat ini dapat dilihat di dashboard Carik Jakarta. Pada tahun 2025 ini, terdapat sekitar 76.095 kader Dasawisma yang mendata. *door to door* kerumah-rumah warga dan kemudian memasukkan datanya ke dalam Aplikasi Carik Jakarta (Carik Jakarta, 2025)

Di antara penggunaan data Carik adalah pencocokan data di bidang pendidikan, perumahan, keluarga berencana, bantuan sosial, dan vaksinasi *Covid-19*. Carik juga telah digunakan sebagai alat atau instrumen untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*). Dalam rangka

memaksimalkan kesejahteraan keluarga, program Carik Jakarta berfokus pada perbaikan data, tertib administrasi, dan pelibatan masyarakat. Hasil pendataan yang komprehensif dan detail ini akan diintegrasikan ke berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jakarta dan digunakan sebagai landasan untuk merancang kebijakan dan program guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Selain itu, data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan penilaian dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai keadaan masyarakat dan program-program yang dilaksanakan. (Alwiyanto, 2022)

Dalam penelitian ini memiliki urgensi karena menyoroti pentingnya data keluarga dalam perencanaan pembangunan yang mana data keluarga yang akurat merupakan landasan yang kokoh untuk membuat dan mengembangkan program-program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Carik Jakarta dapat disebut sebagai inovasi *e-government* karena membawa perubahan dalam system pendataan keluarga di Provinsi DKI Jakarta, yang mana sebelum adanya aplikasi ini proses pendataan yang dilakukan adalah dengan cara manual oleh kader Dasawisma menggunakan formulir kertas yang dalam pengambilan datanya memakan banyak waktu dan rawan terjadi kesalahan dalam penulisan juga

menyulitkan koordinasi lintas sektor pemerintahan menjadi pendataan *digital*.

Dengan adanya aplikasi Carik Jakarta dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang mana Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk merubah cara mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data keluarga. Hal ini menciptakan keterpaduan data yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyusunan kebijakan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader Dasawisma (masyarakat) sebagai pengguna aktif teknologi. Dengan kata lain, Carik Jakarta bukan sekadar digitalisasi alat kerja, melainkan inovasi yang mengubah cara kerja pemerintah dalam mengelola data, membuat keputusan atau membuat kebijakan yang lebih baik dan juga sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia, khususnya dalam konteks pendataan dan pelayanan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Inovasi *E-Government* Aplikasi Berbasis Pendataan Keluarga Satu Pintu Carik Jakarta Dalam Pengumpulan Data Komprehensif Keluarga Oleh Dasawisma dapat dikaji melalui konsep teori berikut ini:

1. Inovasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan inovasi sebagai sebuah langkah pembaruan melalui introduksi gagasan atau temuan orisinal. Definisi ini menekankan pada kehadiran nilai kebaruan yang membedakan suatu metode atau alat dari standar yang sudah dikenal luas oleh khalayak sebelumnya.

Seluruh proses pengembangan dan penyediaan produk yang baru, lebih unggul, atau lebih terjangkau dibandingkan produk yang sudah ada di pasaran disebut sebagai inovasi. Definisi ini memberikan penekanan kuat untuk melihat inovasi sebagai proses penemuan (*invention*). Rogers (dalam Kristiawan, 2018) menyatakan bahwa:

“An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption. It matters little whether or not an idea is objectively new, because the perceived newness of the idea for the individual determines their reaction to it.”

Pada dasarnya, inovasi didefinisikan sebagai praktik, objek, atau ide yang dianggap baru oleh individu atau kelompok dalam suatu unit adopsi. Tingkat kebaruan yang dirasakan oleh individu tersebut menjadi faktor krusial yang mendasari bagaimana mereka akan bereaksi terhadap gagasan tersebut. Jika konsep

tersebut terlihat baru bagi individu, maka itu merupakan sebuah inovasi, sedangkan Damanpour (1991) dalam (Rahayu et al., 2020) menyatakan bahwa inovasi dapat berbentuk produk atau layanan baru, teknologi proses produksi baru, sistem struktural baru, dan administrasi baru atau rencana yang baru bagi anggota organisasi.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat dipahami bahwa inovasi adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau merupakan hasil dari sebuah konsep dan ide yang diciptakan oleh manusia. Dengan adanya inovasi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan dan memperbaiki kehidupan.

2. Atribut Inovasi

Menurut Rogers dalam (Suwarno, 2008) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut yang terdiri dari lima dimensi, yaitu:

1) *Relatif Advantage* atau Keunggulan Relatif

Sebuah inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang sudah ada sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat pada sebuah inovasi yang menjadi ciri khas yang membedakannya dengan hal-hal lain.

2) *Compatibility* atau Kesesuaian

Inovasi harus mempunyai sifat yang kompatibel atau sesuai dengan inovasi yang diganti atau

selanjutnya. Hal tersebut dilakukan agar inovasi lama tidak dibuang begitu saja (salah satunya karena faktor biaya yang mahal), namun juga karena inovasi yang lama dapat menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi yang terbaru. Hal ini juga dapat membantu mempercepat proses adaptasi dan pembelajaran terhadap inovasi baru.

3) Complexity atau Kerumitan

Karena sifatnya yang lebih baru, maka inovasi memiliki tingkat kerumitan yang tinggi daripada inovasi sebelumnya. Namun, inovasi terbaru menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini bukanlah suatu masalah yang penting.

4) Triability atau Kemungkinan dicoba

Inovasi dapat diterima jika sudah diuji terihat memiliki manfaat, keunggulan, dan nilai lebih dari inovasi yang lama. Produk dari inovasi harus melewati tahap uji publik, dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk menguji kualitas inovasi tersebut.

5) Observability atau Kemudahan diamati

Inovasi juga harus dapat dengan mudah diamati dari segi bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dengan atribut yang sudah tercantu di atas, jelas bahwa inovasi adalah metode baru untuk memproduksi atau mengerjakan sesuatu dengan mengganti pendekatan cara yang sebelumnya. Inovasi memiliki dimensi geofisik yang menempatkannya pada suatu wilayah, tetapi hal itu mungkin sudah lama umum di tempat lain.

3. Electronic Government (e-Government)

e-Government memiliki berbagai macam definisinya, *e-government* atau juga yang dikenal dengan istilah *Electronic Government* merupakan kegiatan dimana pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk memberikan dan menyediakan layanan (Luh et al., 2021). World Bank atau Bank Dunia juga mendefinisikan *e-government*:

“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”

Implementasi *e-government* melalui teknologi informasi bertujuan untuk mempererat interaksi antara otoritas pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal. Sejalan dengan pandangan Coursey dan Norris (2008) dalam

(Luh et al., 2021) integrasi *digital* ini juga menjadi instrumen penting dalam merealisasikan berbagai target strategis dalam agenda manajemen birokrasi. Di tengah akselerasi inovasi komunikasi yang masif, kemajuan dan daya saing suatu bangsa kini sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengadopsi serta menguasai perkembangan IPTEK terkini.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan negara, atau yang dikenal sebagai *e-government*, merupakan amanat dari “Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003”. Inisiatif ini dirancang untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah sehingga kualitas layanan bagi warga negara meningkat secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan inovasi teknologi diharapkan menjadi katalisator bagi aparatur negara untuk membangkitkan kembali performa pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif. Secara fundamental, adopsi pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk mentransformasi sistem pelayanan agar menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan daya guna operasional pemerintah.

Menurut Indrajit dalam (Angguna & Gani, 2015) dalam risetnya dari *Harvard JFK School of Government* mengetahui bahwa terdapat tiga elemen sukses yang

harus dimiliki dan diperhatikan dengan cermat. Ketiga elemen sukses tersebut adalah:

1. *Support* atau Dukungan

Elemen *Support* menduduki posisi paling krusial dalam keberhasilan implementasi *e-government*, terutama yang berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) dari para pemegang kebijakan publik. Keberadaan dukungan ini mencakup kesepahaman bersama mengenai kerangka kerja sistem *digital* sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi nasional. Selain itu, internalisasi konsep pemerintahan elektronik menuntut adanya konsistensi yang menjangkau seluruh elemen, mulai dari aparatur negara hingga lapisan masyarakat luas. Hal ini dioptimalkan melalui strategi komunikasi dan promosi yang efektif agar proses transformasi *digital* dapat dipahami serta diadopsi secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. *Capacity* atau Kemampuan

Capacity merupakan kunci utama dalam mentransformasikan visi *e-government* menjadi realitas operasional yang nyata. Untuk memperkuat aspek kemampuan ini, terdapat tiga komponen dasar yang harus dipenuhi secara simultan oleh pemerintah. Hal ini dimulai dari ketersediaan dukungan finansial yang memadai untuk mendanai setiap inisiatif *digital*, hingga penyediaan sarana teknologi

informasi yang mutakhir karena infrastruktur fisik menyumbang separuh dari persentase keberhasilan sistem tersebut. Selain aspek teknis, faktor penentu lainnya adalah keterlibatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan keahlian spesifik agar implementasi teknologi dapat berjalan selaras dengan target kebermanfaatan yang ingin dicapai bagi masyarakat luas.

3. *Value* atau Manfaat

Elemen pertama dan kedua merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah sebagai penyedia layanan (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang mendapatkan manfaat dari penerapan konsep tersebut, mengingat masyarakat adalah penentu utama kualitas sebuah layanan *digital*, maka efektivitas *e-government* sangat bergantung pada perspektif pengguna sebagai pihak yang memanfaatkannya. Pemerintah dituntut untuk lebih selektif dalam memilih jenis layanan elektronik yang akan dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi teknologi informasi benar-benar menghasilkan solusi yang relevan bagi problematika warga, bukan sekadar pemenuhan formalitas birokrasi.

METODE

Landasan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif deskriptif. Merujuk pada definisi yang dipaparkan oleh Creswell (1998) dalam (Herdiansyah, 2010), metode kualitatif merupakan upaya ilmiah untuk menggali isu-isu kemanusiaan di tengah masyarakat melalui pemaparan deskripsi yang mendetail dan komprehensif. Prosedur ini mengutamakan pengumpulan informasi langsung dari sumbernya dalam kondisi yang natural guna menjaga keaslian data dari pengaruh luar peneliti.

Sedangkan untuk proses pengumpulan informasi yang dipakai studi pustaka, pengamatan langsung di lapangan, serta dialog mendalam dengan para informan kunci. Seluruh data yang terkumpul kemudian diselaraskan dengan kerangka teoretis untuk dijabarkan secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif Atribut Inovasi dari Rogers (Suwarno, 2008) yang menjelaskan bahwa Inovasi adalah pendekatan baru untuk menggantikan cara-cara lama dalam melakukan atau memproduksi sesuatu. Guna memastikan integritas hasil penelitian, pengolahan data dijalankan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Model ini mencakup siklus sistematis yang dimulai dari tahap pengumpulan data, penyederhanaan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Relative Advantage* atau

Keunggulan Relatif

Dalam Teori Atribut Inovasi Rogers, *relative advantage* merujuk pada sejauh mana suatu inovasi menawarkan keunggulan dan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Pada konteks Aplikasi Pendataan Keluarga Satu Pintu Carik Jakarta, keunggulan relatif tidak hanya tercermin dari adanya digitalisasi pendataan, tetapi terutama dari dampaknya terhadap tingkat penerimaan dan adopsi inovasi oleh aktor pelaksana di lapangan, khususnya kader Dasawisma dan aparatur pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, keunggulan relatif Carik Jakarta paling nyata dirasakan oleh aparatur pemerintah dan kader Dasawisma melalui perubahan signifikan dalam alur kerja pendataan. Peralihan dari pendataan manual ke sistem digital terintegrasi mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data, sekaligus mengurangi risiko kehilangan dan duplikasi data. Data yang masuk secara real time ke pusat data Dinas PPAPP memungkinkan pemerintah memiliki basis data keluarga yang lebih mutakhir, yang dalam praktiknya digunakan sebagai

rujukan utama dalam penentuan sasaran program dan perencanaan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keunggulan relatif Carik Jakarta berkontribusi langsung terhadap meningkatnya keberterimaan inovasi di tingkat birokrasi, karena aplikasi ini dipandang mampu menjawab kebutuhan kerja yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh sistem manual.

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan adanya variasi pengalaman kader Dasawisma dalam merasakan manfaat keunggulan relatif tersebut. Bagi kader yang memiliki tingkat literasi digital yang lebih baik, Carik Jakarta dipersepsikan sebagai inovasi yang mempermudah pekerjaan karena sistem secara otomatis mengarahkan urutan pertanyaan, melakukan validasi awal data, dan memastikan kelengkapan isian. Sebaliknya, bagi kader yang kurang terbiasa dengan teknologi, keunggulan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal dan masih memerlukan pendampingan. Variasi ini menunjukkan bahwa keunggulan relatif inovasi tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh kapasitas pengguna, yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat adopsi inovasi di lapangan.

Dari perspektif masyarakat, keunggulan relatif Carik Jakarta bersifat lebih tidak langsung. Masyarakat tidak menggunakan aplikasi secara mandiri, namun merasakan dampaknya melalui peran kader Dasawisma yang semakin aktif dalam mendorong kelengkapan dokumen kependudukan. Integrasi data Carik Jakarta dengan perumusan kebijakan dan program sosial pemerintah membuat warga menjadi lebih sadar akan pentingnya data yang akurat dan dokumen resmi. Meski demikian, manfaat seperti transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan kebijakan lebih banyak dirasakan di tingkat pemerintah, dan belum sepenuhnya terobservasi secara langsung oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, keunggulan relatif Aplikasi Carik Jakarta terbukti menjadi faktor kunci yang mendorong adopsi inovasi di tingkat pemerintah dan kader Dasawisma, terutama melalui peningkatan efisiensi kerja dan kualitas data. Namun, keunggulan tersebut masih memiliki batasan dalam hal pemerataan manfaat, khususnya bagi kader dengan keterbatasan literasi digital dan masyarakat yang hanya menerima dampak secara tidak langsung. Temuan ini menegaskan bahwa relative

advantage Carik Jakarta telah terwujud secara empiris dalam praktik pendataan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas pelaksana dan strategi pendukung yang menyertainya.

2. *Compatibility* atau Kesesuaian

Compatibility atau Kesesuaian menurut Rogers yang terdapat dalam (Suwarno, 2008) menunjukkan bahwa sebuah inovasi perlu selaras dengan praktik atau sistem yang sebelumnya digunakan. Inovasi tidak serta-merta menggantikan cara lama, melainkan menjadi bagian dari proses transisi menuju cara kerja yang lebih baru. Kesesuaian ini penting karena membantu pengguna beradaptasi dengan lebih mudah, memanfaatkan pengalaman sebelumnya, serta mempercepat proses pembelajaran dalam menggunakan inovasi baru. Adanya inovasi Carik Jakarta memiliki kesesuaian dengan pendataan sebelumnya. Dimana dalam proses pendataan dan dengan adanya penyesuaian variabel pertanyaannya yang sebagian besar sama seperti saat pendataan masih manual, namun berubah menjadi *digital*.

Dalam kesesuaiannya, Inovasi Pendataan Keluarga Satu Pintu Carik Jakarta berkaitan erat dengan kebutuhan data-data yang

diperlukan antar dinas di pemerintahan. Pernyataan dari wawancara tersebut juga sesuai dengan penjelasan berdasarkan yang dikutip pada Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Tahun 2021 (P. A. dan P. P. Dinas Pemberdayaan, 2021) mengatakan bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kesempatan untuk mengajukan dan memberikan masukan terhadap instrumen pendataan keluarga. Pengajuan dari Perangkat Daerah akan diolah dan disesuaikan dengan instrument yang ada dan output yang didapat. Maka dalam hal ini, Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP memastikan bahwa variabel data yang dikumpulkan dapat sesuai (*compatible*) dengan kebutuhan program dinas lain. Ini adalah langkah yang dilakukan untuk meminimalkan penyesuaian dan mempercepat adopsi data oleh pemerintah, baik untuk bahan evaluasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta, merumuskan dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sebagai dasar perencanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yaitu kesesuaian yang berkelanjutan, yang mana dalam pengelolaan aplikasi ini bukan hanya dilakukan pada saat awal inovasi

dibuat saja, tetapi harus terus-menerus diperbarui dan berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan data dan program yang terus berkelanjutan.

Dari sisi Masyarakat atau Dasawisma yaitu dengan adanya Inovasi Pendataan Aplikasi Carik Jakarta ini dapat mendukung langsung dan mempermudah tugas inti Dasawisma (mendata). Menggantikan rutinitas pendataan manual yang sulit dengan proses *digital* yang jauh lebih efisien, sehingga mempercepat dan mempermudah kerja kader Dasawisma.

3. Complexity atau Kerumitan

Mengutip pandangan Rogers dalam (Suwarno, 2008), atribut kerumitan sering kali melekat pada suatu inovasi karena sifat kebaruannya yang melampaui metode terdahulu. Meskipun tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi, hal ini cenderung dikesampingkan mengingat keunggulan dan efektivitas cara baru yang ditawarkan. Dalam konteks ini, dimensi kompleksitas dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana tingkat kesulitan teknis dalam sebuah pembaruan.

Kerumitan (*Complexity*) yang dirasakan dari sisi Pemerintah yaitu sistem dukungan yang belum optimal, dilihat dari adanya jumlah

pengaduan yang masuk, kendala server yang lambat. kendala teknis bersamaan (karena lonjakan *traffic*) secara jelas menunjukkan bahwa infrastruktur IT dan sistem *support* belum sepenuhnya ideal untuk menangani volume data dan pengguna yang besar.

Kemudian yang terakhir yaitu dari sisi pelatihan dan pendampingan, dengan pelatihan dan pengajaran yang disiapkan. Kerumitan diatasi melalui ketersediaan pelatihan khusus dan penanggung jawab di setiap wilayah. Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP dan TP PKK DKI Jakarta memberikan dan menyediakan sistem pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, terutama jika ada perubahan dalam proses pendataan. Bentuk monitoring yang disebutkan diatas yaitu adalah *Master of Training (MoT)*.

Gambar 1. 2 Kegiatan *Master of Trainer (MoT)* oleh Pusdatin Dinas PPAPP



Sumber: Website TP PKK Provinsi DKI Jakarta, 2024.

Master of Training (MoT) terdiri dari Kader PKK Provinsi dan Kota berjumlah 5 angkatan dan 1 angkatan untuk pengelola RPTRA (teknis aplikasi pendataan). Hal ini merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa Kader Dasawisma sebagai ujung tombak pendataan dapat mengoperasikan aplikasi secara efektif.

Untuk sisi masyarakat yaitu Kader Dasawisma dapat dilihat kesulitan yang dihadapi yaitu adanya tantangan dalam beradaptasi dengan pendataan baru dalam aplikasi dan kurang familiarnya Kader Dasawisma dengan penggunaan *smartphone*. Namun didalam kedua pernyataan tersebut juga dapat diketahui bahwa Kader Dasawisma juga terus belajar dalam penggunaannya dan mengikuti update yang dilakukan jika ada pendataan keluarga baru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini dikuatkan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP dan TP PKK DKI Jakarta seperti ToT (*Training of Trainer*). Kader Dasawisma diberikan sosialisasi dan pelatihan yaitu ToT (*Training of Trainers*).

Gambar 1. 3 Monitoring kegiatan *Training of Trainer (ToT)* oleh Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP



Sumber: Instagram Official Carik Jakarta, 2024.

Sosialisasi dan pelatihan tersebut dilakukan agar Kader Dasawisma tidak kaget dengan perubahan yang dilakukan saat pendataan. Dalam sosialisasi dan pelatihan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai Aplikasi Carik Jakarta agar Kader Dasawisma memiliki pemahaman lebih baik dan benar tentang penggunaannya, bagaimana pendataan baik data keluarga, individu dan lingkungan yang dikumpulkan menjadi lebih akurat. Dalam hal ini diharapkan agar kapasitas Kader Dasawisma sebagai pengumpul data keluarga, individu dan lingkungan dengan menggunakan aplikasi Carik Jakarta standarnya terpenuhi.

4. Triability atau Kemungkinan dicoba

Triability atau kemungkinan dicoba menurut Rogers dalam (Suwarno, 2008) yaitu bahwa Inovasi hanya dapat diadopsi jika telah diuji dan

terbukti memberikan keunggulan atau nilai tambah yang lebih besar dibandingkan penemuan sebelumnya. Oleh karena itu, produk kreatif harus melewati fase “pengujian publik” di mana semua orang memiliki kesempatan untuk menilai kualitas penemuan tersebut. Inovasi Carik Jakarta terbukti dapat dicoba oleh Masyarakat, yaitu oleh Kader Dasawisma karena sebagai Kader Dasawisma, mereka juga adalah warga yang datanya juga didata oleh sesama Kader Dasawisma lainnya.

Gambar 1. 4 Poster Piloting yang diunggah pada akun @carik.jakarta



Sumber: Instagram Official Carik Jakarta, 2024.

Uji coba tersebut yaitu *Piloting*. Piloting yang dilakukan oleh Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP dilakukan untuk menilai atau mengetahui umpan balik (*feedback*) terkait penggunaan aplikasi lapangan yang muncul seperti *server* yang lambat dan aduan dari kader dasawisma

terkait pendataan yang bermasalah lainnya. Kemudian dari hasil piloting ini selanjutnya digunakan untuk memperbaiki permasalahan alur kerja dan menyempurnakan aplikasi kembali sebelum dipakai atau digunakan untuk mendata secara massal ke seluruh keluarga dan masyarakat di DKI Jakarta.

Pelaksanaan *Piloting* yang dilakukan oleh Kader Dasawisma itu untuk mencoba inovasi dalam skala kecil, tanpa perlu berkomitmen penuh atau merusak sistem pendataan yang sudah ada. Jika ada masalah (seperti *bug* aplikasi, kesulitan *login*, server yang lambat), risiko kegagalan hanya terbatas pada area uji coba.

5. Observability atau Kemudahan diamati.

Dengan adanya Inovasi Pendataan Keluarga Satu Pintu dengan Aplikasi Carik Jakarta dari Kemudahan diamati dari hasil pendataan keluarga melalui aplikasi ini yaitu bahwa masyarakat bisa melihat hasil dari pendataan secara umum di *Website* Carik Jakarta namun dalam bentuk umum seperti infografis, statistik, dan jumlah. Sedangkan data individu yang didapatkan tidak dibagikan secara umum karena merupakan data pribadi dan dilindungi. Kemudian untuk data individu hanya bisa diamati oleh orang yang berkepentingan dan berwenang

seperti *stakeholder* atau SKPD yang membutuhkan untuk memberikan atau membuat kebijakan bagi masyarakat. Untuk itu menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dalam pendataan keluarga satu pintu dengan aplikasi Carik Jakarta benar-benar digunakan dan memiliki dampak terukur didalam tingkat pembuatan kebijakan.

Gambar 1. 5 Contoh hasil pendataan secara umum di Website Carik Jakarta



Sumber: Carik Jakarta
Dashboard, 2025.

Dinas PPAPP dan TP-PKK Provinsi DKI Jakarta jelas mengamati dan mengakui peningkatan efektifitas dan efisiensi yang didorong oleh Inovasi Pendataan Keluarga Satu Pintu Carik Jakarta. Selanjutnya yaitu dari Kemudahan Diamati dari *Feedback* pengguna, yaitu Kader Dasawisma.

Masukan ini menjadi indikator langsung bagi pemerintah yang terkait mengenai bagian mana dari inovasi ini yang perlu untuk segera perbaiki, yang mana ini merupakan bagian dari proses observasi perbaikan.

Feedback atau masukan tersebut menjadi masukan utama dari kader-kader dasawisma, termasuk dari komen di *playstore*. Keluhan yang paling sering diamati dan dilaporkan oleh pengguna adalah masalah teknis, terutama saat momen-momen pendataan yang sedang berlangsung. Artinya, masalah kinerja aplikasi di lapangan dapat diamati dan disampaikan langsung oleh pengguna, dan keluhan ini menjadi data yang diolah oleh pengembang yaitu Pusdatin Keluarga Dinas PPAPP DKI Jakarta untuk pengembangan dan perbaikan Aplikasi Carik Jakarta di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Atribut Inovasi Rogers, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pendataan Keluarga Satu Pintu Carik Jakarta merupakan inovasi *e-government* yang secara umum telah memenuhi indikator atribut inovasi. Keunggulan utama inovasi ini terletak pada *relative advantage* dan *compatibility*, yang tercermin dari peningkatan efisiensi, akurasi, dan integrasi data keluarga dibandingkan pendataan manual sebelumnya, serta kesesuaiannya dengan alur kerja pendataan yang telah dijalankan oleh kader Dasawisma. Keunggulan tersebut mendorong penerimaan dan

pemanfaatan aplikasi di tingkat pemerintah dan pelaksana pendataan.

Namun demikian, beberapa atribut inovasi masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek *complexity* dan *observability*. Keterbatasan literasi *digital* sebagian kader Dasawisma serta kendala teknis sistem menunjukkan bahwa pemanfaatan inovasi belum sepenuhnya merata. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses dan pemanfaatan hasil pendataan mengindikasikan bahwa manfaat inovasi masih lebih dominan dirasakan di tingkat pemerintah dibandingkan publik secara langsung. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan inovasi dan tingkat kepercayaan publik apabila tidak ditangani secara strategis.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan dari sumber daya manusia, peningkatan stabilitas dan kapasitas sistem, serta strategi sosialisasi yang lebih terarah untuk meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat dari pemerintah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam kajian inovasi *e-government* di tingkat daerah dengan menekankan faktor kunci keberhasilan serta tantangan implementasi yang perlu diperhatikan guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan data

keluarga sebagai dasar perumusan kebijakan publik

DAFTAR PUSTAKA

Alwiyanto, A. (2022, November 1). Program Carik Jakarta Memegang Peran Penting Saat Masa Pandemi. *Kompasiana.Com*. https://www.kompasiana.com/adityaalwiyanto3404/6360ede3375dd149132bee23/program-carik-jakarta-memegang-peran-penting-saat-masa-pandemi?page=2&page_images=1

Angguna, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang. *Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.

Carik Jakarta. (2021). *LAPORAN PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020*. 1–23. <https://carik.jakarta.go.id/#/publikasi>

Carik Jakarta. (2022). *BUKU PROFIL KELUARGA DKI JAKARTA. HASIL PENDATAAN KELUARGA DENGAN CARIK JAKARTA TAHUN 2021*. <https://carik.jakarta.go.id/#/publikasi>

Carik Jakarta. (2025). *Dashboard*

Keluarga Jakarta Pendataan Keluarga Satu Pintu menurut data Aplikasi Carik Jakarta. <https://carik.jakarta.go.id/dashboar/>

Dinas Pemberdayaan, P. A. D. P. P. (2022). *Carik Jakarta*. Jakarta.Go.Id. <https://www.jakarta.go.id/carik-jakarta>

Dinas Pemberdayaan, P. A. dan P. P. (2021). *Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Tahun 2021*. 1–23.

Herdiansyah, H. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerbit Salemba Humanika.

Kristiawan, M. (2018). *Inovasi pendidikan* (Issue July).

Kurniansyah, D., & Hannie, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintahan Desa (E-Gov) di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 155–174. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.13739>

Luh, N., Dewi, Y., Maheswari, A. A. I. A., Luh, N., Lestari, Y., Putu, N., Antari, B. W., & Subanda, I. N. (2021). *E-Government Approach in Building Information Systems for Public Services*. 560(Acbleti 2020), 84–87.

Muamar, A. (2023). *Carik Jakarta:*

- Data Komprehensif untuk Dukung Kebijakan yang Lebih Tepat.* Greennetwork.Id. <https://greennetwork.id/kabar/carik-jakarta-data-komprehensif-untuk-dukung-kebijakan-yang-lebih-tepat/>
- Pusat Data dan Informasi Keluarga (PUSDATIN Keluarga). (2023). *PETUJUK TEKNIS PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU TAHUN 2023*.
- Rahayu, A. Y. ., Juwono, V., & Rahmawati, K. P. (2020). Pelayanan dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep. In *PT RajaGrafindo Persada* (Vol. 35, Issue 2). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/pelayanan-publik-dan-e-government-sebuah-teori-dan-konsep>
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik* (Issue October 2008). STIA-LAN Press.
- Yuangwidi, K. P., Razali, M. S., Fuad, F. N. M. Z., Abdullah, N. H. C., Salma, G. N. P., & Arif Ashari, M. E. (2021). Jurnal Geografi. *Jurnal Geografi*, XIX(2), 35–48.